

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

AIR LANGGA DAFFA ATHALLAH
NPP. 31.0421

Asdaf Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik
Email: @31.0421@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph. D

ABSTARCT

Problem/Background: Waste is one of the problems currently occurring in Indonesia. High population growth has a major impact on waste production. Waste production that is not commensurate with waste management capabilities and limited land area requires a waste management system that can reduce the rate of increase in waste generation. **Purpose:** This research aims to determine and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of waste management policies in Semarang City, Central Java Province and formulate efforts to optimize the implementation of these policies. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods with data collection in the form of interviews, observations and documentation. **Results/Findings:** The results of the research show that the supporting factors for implementing the policy are the accuracy of waste management policy instruments, clarity of policy design including procedures, time and resources and changes in waste management targets, clarity of institutional design including implementing organizations and coordination between and among implementing organizations, smooth supervision by supervisory bodies, availability of required resources and high levels of benefits felt by the community. The inhibiting factors are difficulties in implementing waste management policy instruments, lack of supervision by the community, insufficient resources needed for waste management, inability of waste management implementers to implement SOPs, and lack of community involvement. **Conclusion:** the implementation of policies carried out by the Semarang City Environmental Service has not run optimally, where there are still several obstacles that affect performance in waste management, so efforts are needed to overcome these problems. **Keywords:** Policy Implementation, Waste Management, Public Policy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Sampah merupakan salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan pengelolaan sampah dan luas lahan yang terbatas memerlukan adanya sistem pengelolaan sampah yang dapat menekan laju pertumbuhan timbulan sampah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah serta merumuskan upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut yaitu ketepatan instrumen kebijakan pengelolaan sampah, kejelasan desain kebijakan mencakup prosedur, waktu dan sumber daya dan perubahan target pengelolaan sampah, kejelasan desain kelembagaan mencakup organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi pelaksana, kelancaran pengawasan oleh badan pengawas, ketersediaan

sumber daya yang dibutuhkan dan tingginya tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan pengelolaan sampah, kurangnya pengawasan oleh masyarakat, ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, ketidakmampuan pelaksana pengelolaan sampah dalam melaksanakan SOP, dan kurangnya keterlibatan masyarakat. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum berjalan dengan optimal dimana masih terdapatnya beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan sampah sehingga diperlukannya upaya dalam mengatasi masalah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kebijakan Publik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang saat ini terjadi di Indonesia (Kahfi, 2017; kompasiana.com, 2022). Permasalahan ini berkaitan dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Dari tujuan tersebut terdapat 11 target, salah satunya yaitu pada tahun 2030, untuk mengurangi dampak negatif untuk lingkungan perkotaan dan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah di perkotaan. Perkembangan timbulan sampah di Indonesia yang bertambah setiap tahun dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Kondisi ini juga terlihat dari data timbulan sampah di Indonesia tahun 2021 ke 2022 yang meningkat secara drastis sebanyak 6.508.238,70 ton (18,04%) dari total sebelumnya yaitu 561.925,63 ton (1,90%). Timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu, atau dengan kata lain banyaknya sampah yang dihasilkan dalam satuan berat (kilogram) gravimetri atau volume (liter) volumetri. Permasalahan terkait sampah ini tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah timbulan sampah yang berbeda-beda dan terdapat provinsi yang memiliki jumlah timbulan sampah terbanyak dibandingkan provinsi yang lain. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah mencapai 493.379,41 ton (8,95%) sampah sehingga perlunya peran pemerintah dalam mengarasi masalah pengelolaan sampah ini.

1.2 Kesenjangan Masalah Diambil (GAP Penelitian)

Rata-rata timbulan sampah tahun 2019-2022 yaitu Jawa Tengah (4.651.692,815 ton), Jawa Timur (4.541.906,93 ton), dan Jawa Barat (3.988.420,37 ton). Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat pertama provinsi dengan timbulan sampah terbanyak di Indonesia. Kota Semarang menempati urutan nomor 1 sebagai kota dengan timbulan sampah terbanyak. Perkembangan timbulan sampah di Kota Semarang tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan sebanyak 335,47 ton (0,08%). Pada tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan sebanyak 449,43 ton (0,052%). Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Terjadi peningkatan timbulan sampah pada setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2023 sehingga perlunya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan terkait sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya-upaya sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan terkait sampah. Upaya tersebut terlihat dari telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk sebagai kerangka kerja acuan untuk penelitian. Selain itu

dapat membantu dalam mengetahui persamaan dan perbedaan signifikan antara penelitian sebelumnya dan yang dilakukan oleh penulis.

Indira Febryanti et al, 2017, “Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah” menjelaskan bahwa Variabel pendorong dalam situasi ini melibatkan koneksi organisasi, atribut pelaku, dan sikap pelaku. Sebaliknya, variabel disinsentif melibatkan kriteria dan tujuan politik, sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi.

Fallita Rahma Wati et al, 2021, “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia” menjelaskan bahwa Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis TPST 3R belum mencapai tingkat optimal dan efektivitas kebijakan ini dinilai dengan menggunakan Teori Campbell.

Agung Prasetya Mayangkara, 2016, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban, “Pemilihan sistem controlled landfill dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Panggung tidak memenuhi kriteria ketepatan kebijakan publik karena adanya kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan TPA, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pemasukan retribusi sampah.

Indri Puspita Sari, 2022, “Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus” menjelaskan bahwa Terdapat korelasi positif sebesar 39% antara sumber daya dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus, sementara terdapat hubungan positif sebesar 10,8% antara lingkungan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

Yulianto Mokodompis et al, 2019, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado” menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Manado berjalan dengan lancar, meskipun menghadapi beberapa hambatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dianggap kurang memadai.

Primus Mukus et al, 2022, “Strategi *Collaborative Governance* Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022” menjelaskan bahwa Kolaborasi dalam penanganan sampah di Desa Tulung Selapan Timur tercapai melalui pelaksanaan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sinergi ini melibatkan peran pemerintah desa sebagai penyedia program dan fasilitas, pabrik sampah sebagai pelaksana program, dan partisipasi masyarakat sebagai pendukung.

Kiki Hardiyanti et al, 2021, “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak” menjelaskan bahwa Temuan riset menunjukkan bahwa tata kelola sampah yang dilakukan belum mencapai tingkat optimal, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pasal tersebut menegaskan bahwa pada tahun 2013, setiap pemerintah daerah atau kota seharusnya telah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai, sesuai dengan standar teknis dan lingkungan, yang dikenal sebagai landfill sanitasi.

Dwi Nur Handayani et al, 2023, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo” menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berada pada tingkat moderat, meskipun sebagian masyarakat sudah terlibat aktif. Namun, dalam pelaksanaannya, peran masyarakat masih cenderung didominasi oleh pihak pemerintah.

Agoeng Prasetya, 2023, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung” menjelaskan bahwa Manajemen sampah di Kota Bandar Lampung masih belum mencapai tingkat optimal dalam menangani permasalahan sampah. Tingkat pengelolaan sampah masih dianggap rendah, dengan banyaknya sampah, khususnya sampah rumah tangga, yang belum dikelola secara efektif.

Nur Vita Adin Niyah, 2017, “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten” menjelaskan bahwa Keefektifan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten dapat dievaluasi berdasarkan lima indikator efektivitas kebijakan. Ini mencakup waktu pencapaian, tingkat pengaruh yang diinginkan, perubahan perilaku masyarakat, dan pelajaran yang diperoleh oleh para pelaksana proyek.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat upaya untuk mengotimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

3.1.1 Pilihan Instrumen Kebijakan

Pilihan instrumen kebijakan dilakukan untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan dan faktor penentu ini mengasumsikan bahwa masalah implementasi bersumber dari instrumen kebijakan yang tidak tepat dan dibatasi oleh kemampuan pemerintah serta karakteristik lingkungan kebijakan. pilihan instrumen kebijakan mencakup pada 2 (dua) hal yaitu ketepatan instrumen dan kemudahan pelaksanaan instrumen. dalam pelaksanaan instrumen kebijakan

Pengelolaan Sampah di Kota Semarang berupa subsidi pengadaan tong sampah organik dan anorganik serta kendaraan pengangkut sampah sudah tepat sesuai dengan kapasitas pemerintahan dan kompleksitas lingkungan kebijakan, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dari segi sumber daya yang terbatas sehingga penyaluran subsidi tidak dapat menyeluruh dan dari segi anggaran yang terbatas sehingga tidak semua RT/RW yang mengajukan permohonan untuk diberikan subsidi dapat menerima subsidi tersebut.

3.1.2 Desain Kebijakan

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didalamnya mengatur jelas langkah pelaksanaan kebijakannya, lama waktu, dan sumber daya yang diperlukan, adapun faktor penghambat untuk tercapainya implementasi kebijakan karena kurang tepatnya tujuan dan persyaratan kebijakan yang tidak jelas. Desain kebijakan yang digunakan menjadi faktor pendukung implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang karena pada setiap UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah memiliki SOP dalam operasional pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang secara rinci mengatur uraian prosedur, pelaksana, kelengkapan, waktu, dan outputnya. Selain itu kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk cepat beradaptasi dengan timbulan sampah yang tidak sesuai dengan prediksi.

3.1.3 Struktur Pengawasan

Implementasi kebijakan disebabkan oleh tidak adanya kontrol atau pengawasan dalam implementasi kebijakan, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antara tujuan dengan hasil kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, struktur pengawasan mencakup 2 (dua) hal yaitu pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan oleh badan pengawas. Dalam pelaksanaannya terdapat rendahnya jumlah aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui *website* dan aplikasi SILAMPAH dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan masih rendahnya pengawasan oleh masyarakat terhadap permasalahan sampah. Pengawasan oleh badan pengawas dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Ombudsman yang masing-masing memeriksa hal yang berbeda terkait pengelolaan sampah.

3.1.4 Desain Kelembagaan

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh satu organisasi atau lebih melalui langkah-langkah yang implementasinya melibatkan koordinasi horizontal dan vertikal di beberapa unit administratif dan tingkatan. Desain kelembagaan meliputi 2 (dua) atribut yaitu jumlah organisasi pelaksana dan koordinasi inter dan antar organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang terdapat 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum yang membantu dalam pengelolaan sampah dan masing-masing memiliki peranan yang berbeda dalam hal pengangkutan dan pemilahan sampah. Ketiga OPD tersebut melakukan koordinasi eksternal antar OPD dengan diadakannya rapat koordinasi yang membahas terkait pengangkutan dan pemilahan sampah dan koordinasi internal melalui rapat evaluasi terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang rutin dilaksanakan 3 (tiga) bulan dan sebulan sekali.

3.1.5 Kemampuan Administratif

Suatu lembaga harus melihat bagaimana kapasitas atau kemampuan administrasi dalam hal personil hingga sumber daya dan anggaran. Selain itu, lembaga harus dilengkapi dengan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kebijakan terlaksana dengan baik. Kemampuan administratif tersebut ditunjukkan oleh ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi) serta kemampuan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Faktor penentu kemampuan administratif DLH Kota Semarang menunjukkan sudah tersedianya sumber daya yang dibutuhkan (SDM, keuangan, teknologi dan informasi) tetapi belum tercukupi untuk melaksanakan operasional pengelolaan

sampah yang menyeluruh dan maksimal disesuaikan dengan jumlah sampah yang semakin banyak. DLH juga dapat dikatakan belum mampu untuk melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dikarenakan belum tercukupinya personil untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan SOP dapat dilihat dari data jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik.

3.1.6 Penerimaan Masyarakat

Suatu implementasi kebijakan yang sukses yaitu bagaimana masyarakat dapat menerima kebijakan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Dari kutipan di atas, dapat diuraikan bahwa penerimaan sosial dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu tingkat kemanfaatan yang dirasakan masyarakat dan keterlibatan masyarakat. implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yaitu keterlibatan masyarakat melalui Bank Sampah Unit yang digerakkan oleh masyarakat masih dirasa kurang dalam membantu mengolah sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali dan memilah sampah berdasarkan jenisnya serta membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti tong sampah/TPS dapat dilihat dari partisipasi Bank Sampah Unit yang semakin berkurang setiap tahunnya.

3.2 Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Penambahan Sumber daya manusia dan teknologi pada setiap UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Dalam mengurangi jumlah sampah di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang harus mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk menangani permasalahan sampah di seluruh wilayah Kota Semarang. Terlihat dari salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu sumber daya baik manusia, anggaran, teknologi dan informasi tidak mencukupi untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang efektif. Anggaran memegang peranan penting dalam mempengaruhi sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Anggaran diibaratkan dengan pondasi bangunan yang menjadi dasar berdirinya bangunan. Maka dari itu, diperlukan anggaran Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota agar SDM dan sarana prasarana dapat tercukupi.

3.2.2 Penambahan anggaran operasional pengelolaan sampah dalam proses penanganan sampah

Anggaran adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Apalagi dalam hal penanganan sampah, yang tentu membutuhkan banyak biaya. Pembiayaan sarana prasarana, tenaga sumber daya manusia yang bekerja, sampai ke pemeliharaan sarana prasarana yang digunakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah dengan meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan anggaran pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah, diperlukan anggaran yang cukup besar agar tenaga sumber daya manusia dapat bekerja secara optimal, serta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

3.2.3 Perlibatan masyarakat, komunitas pemerhati lingkungan dan swasta dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menekan pertambahan jumlah timbulan sampah di Kota Semarang, namun pada kenyataannya peran masyarakat masih kurang peduli dalam hal pengelolaan sampah. . Edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah dengan cara 3R dan memelihara maggot di setiap rumah tangga. Edukasi dan sosialisasi masyarakat dapat dilakukan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Youtube* terhadap peran sosial media untuk mendorong keterlibatan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang masih terdapat kendala utama yaitu kurangnya pengawasan dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Temuan tersebut sama seperti yang diteliti oleh Agung Prasetya Mayangkara 2016 yaitu dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Panggung tidak memenuhi kriteria ketepatan kebijakan publik karena adanya kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan TPA, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pemasukan retribusi sampah

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam implementasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti adanya kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah, kurangnya partisipasi masyarakat dan sulitnya pelaksanaan instrumen kebijakan pengelolaan sampah. Dalam mengatasi faktor penghambat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya seperti penambahan sumber daya manusia dan teknologi pada setiap UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah serta anggaran operasional pengelolaan sampah sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah.

Keterbatasan Penelitian: Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu seperti keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2020). *Penggunaan Teknologi Pengelolaan Sampah*. <https://dlh.semarangkota.go.id/penggunaan-teknologi-pengolahan-sampah/>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2022a). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021*. <https://dlh.semarangkota.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintahan-lkjip-dinas-lingkungan-hidup-kota-semarang-tahun-2021/>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (2022b). *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang 2021-2026*. <https://dlh.semarangkota.go.id/rencana-strategis-dinas-lingkungan-hidup-kota-semarang-tahun-2021-2026/>

Febryanti, I., & Suryaningsih, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(1),

26–38. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/18993>

Handayani, D. N., & Agussalim, A. (2023). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo. *KOMUNITAS*, 14(1), 60–70. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/6145>

Hardiyanti, K., Purwaneni, H., & Sundarso. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>

Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1 SE-Volume 4 nomor 1 Juni 2017), 12–25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>

Mayangkara, A. P. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/293642486.pdf>

Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23860>

Mukus, P., Amaliatul Walidain, & Kariem, M. Q. (2022). Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. *TheJournalish: Social and Government*, 4 No. 2(Social and Government). <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.442> Hal. 116-123

Niyah, N. V. A. (2017). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(2). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/viewFile/5173/4840>

Prasetya, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70168>

Sari, I. P. (2022). *Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus*. Universitas Diponegoro. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/13201/>

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung : Alfabeta

Wati, F. R., Rizqi, A., Iqbal, M., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>